

Abstrak

Sektor perpajakan menjadi kunci utama dalam menopang perekonomian negara. Penerimaan pajak dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan dan membangun fasilitas umum demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas pengadaan barang sebagai objek pajak PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 sesuai dengan PMK Nomor 18/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Perhitungan Pasal 22 dikenakan tarif 1,5% tidak termasuk PPN kemudian disetorkan dengan menggunakan kode billing ke Bank Daerah. Secara keseluruhan pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, namun masih terdapat beberapa kesalahan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan keterlambatan dalam penyetorannya.

Kata kunci: *bendahara pemerintah, pemungutan, penyetoran, pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 22*

Abstract

The taxation sector is the main key in supporting the country's economy. Tax revenues can be used to carry out development and build public facilities to improve people's welfare. The purpose of this study is to find out the mechanism for implementing the collection, deposit and reporting of goods procurement as an object of Article 22 Income Tax which is carried out by the Department of Communication and Information of Tanah Laut Regency in 2021 in accordance with PMK Number 18/PMK.010/2018 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Finance Number 34/PMK.010/2017 concerning Collection of Income Tax Article 22 in connection with payments for delivery of goods and activities in the import sector or business activities in other fields. This study uses a qualitative descriptive method approach with interview techniques and literature study. The results of the research show that the Calculation Tax Article 22 is subject to a 1.5% rate excluding VAT and then deposited using a billing code to the Regional Bank. Overall, the implementation of the collection, deposit and reporting of Article 22 Income Tax is in accordance with tax regulations, but there are still some errors in the calculation of Article 22 Income Tax and delays in depositing it.

Keywords: government treasurer, collection, deposit, reporting, Article 22 Income Tax